

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Tegaskan Hak Mereka Sebagai Kunci Penanganan Deforestasi Dunia

Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Mengeluarkan Deklarasi Palangkaraya

Untuk Disiarkan Segera

19 Maret 2014

Jakarta, Indonesia, dan Moreton-in-Marsh, UK, Rabu 19 Maret 2014 – Sesuai pertemuan besar dengan peserta lintas benua tentang [Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal](#), 9 – 14 Maret 2014 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, masyarakat adat dan komunitas lokal menyerukan kepada masyarakat internasional, pemerintah dan organisasi-organisasi internasional untuk menghormati dan melindungi hak-hak mereka atas hutan, tanah, wilayah dan sumberdaya alam selaras dengan hukum internasional.

Seruan ini disampaikan dalam bentuk [Deklarasi Palangkaraya](#) mendesak pemerintah, pihak swasta, lembaga-lembaga keuangan, organisasi internasional, dan masyarakat internasional, untuk:

- Menghentikan seluruh produksi, perdagangan, dan konsumsi komoditi yang berasal dari perusakan hutan, perampasan lahan dan berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
- Menghentikan semua penyerobotan tanah dan hutan masyarakat adat dan komunitas lokal oleh proyek-proyek agribisnis, industri ekstraktif, infrastruktur, energi, dan 'ekonomi hijau' yang mengingkari hak-hak dasar masyarakat adat dan komunitas lokal;
- Segera mengambil tindakan nyata untuk menjunjung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal pada semua tingkatan termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumberdaya, hak untuk menentukan sendiri pembangunan yang mereka perlukan dan untuk terus memiliki, menguasai dan mengelola tanah-tanah mereka menurut pengetahuan dan mata pencaharian mereka sendiri.

“Ancaman terhadap hutan-hutan masyarakat adat menunjukkan keserupaan wajah di seluruh dunia,” demikian Carmenza Tez Juogibioy, seorang tokoh masyarakat adat dari Colombia. “Negara dan perusahaan melakukan deforestasi meskipun tindakan ini melanggar hak-hak masyarakat yang berdiam di dalam dan sekitar hutan. Pemerintah-pemerintah sama sekali tidak menghargai tuntutan-tuntutan kami, namun kami akan terus berjuang demi penghormatan atas tanah dan kampung halaman kami serta penghormatan atas hak azasi manusia. Itu sumber hidup masyarakat kami.”

Utusan-utusan masyarakat adat dan komunitas lokal dari Afrika, Asia dan Amerika Latin serta organisasi masyarakat sipil selama satu minggu telah membahas laju kerusakan hutan dunia yang sudah sangat mengkhawatirkan, mengkaji sebab musabab langsung maupun tak langsung lenyapnya hutan dunia dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, serta menunjukkan kemampuan masyarakat yang tak tertandingi dalam menyelamatkan hutan.

Marceline Louanga, perwakilan masyarakat adat dari Kamerun, mengatakan: "Hutan memberi kami makan dan melindungi kami. Masyarakat kami tahu bagaimana melindungi hutan, tetapi negara telah mengambil paksa hutan-hutan kami. Kami tidak lagi memiliki akses ke lahan-lahan hutan, dan tanpa kehidupan dan mata pencaharian yang bersumber di hutan, jauh lebih berat lagi beban kami untuk mendidik anak-anak kami"

Peserta lokakarya telah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hukum HAM internasional yang mengakui hak-hak masyarakat tersebut serta perlunya perlindungan oleh negara dan kenyataan adanya pengabaikan yang sistematis terhadap hak-hak tersebut di lapangan. Pertemuan tersebut juga menyoroti bahwa para pemerintah sering gagal menegakkan penghormatan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan mengeluarkan ijin-ijin dan konsesi-konsesi kepada perusahaan-perusahaan di atas tanah masyarakat tanpa adanya keputusan bebas masyarakat untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap proyek tersebut di atas tanah mereka; sebuah hak masyarakat yang dikenal dengan *free, prior, and informed consent*.

"Masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia secara heroik telah mempertahankan hutan terhadap berbagai tekanan dan ancaman yang terus berlangsung" demikian Joji Cariño, dari Forest Peoples Programme, salah satu penyelenggara lokakarya ini. "Pengurusan hutan yang efektif harus dibangun di atas kebajikan-kebajikan lokal yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dan menerapkan peraturan yang tegas terhadap investasi-investasi predatorik yang mengancam kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal serta hutan-hutan mereka"

Deklarasi Palangkaraya menyampaikan penegasan para peserta lokakarya bahwa dengan melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal kerusakan hutan dapat dihambat dan bahkan bisa dipulihkan.

"Masyarakat telah membuktikan kemampuan mereka untuk mengelola hutan selama bergenerasi-generasi" kata Edy Subahani dari POKKER SHK Kalteng, yang turut menyelenggarakan acara ini. "Mereka memiliki pengetahuan inovatif untuk menjaga hutan seraya mengembangkan ekonomi dan menghasilkan pangan serta melestarikan kehidupan spiritual yang berkaitan dengan hutan. Mereka juga banyak berperan memberikan pendapatan bagi perekonomian lokal dan nasional serta terlibat dalam pemulihan hutan-hutan yang rusak. Pemerintah sudah sepatutnya memperkuat dan mengembangkan kecakapan dan pengetahuan masyarakat ini."

"Pemerintah dan perusahaan harus mengakui, menghormati dan memulihkan hak-hak masyarakat. Pemerintah juga semestinya menghentikan dan menunda pemberian ijin kepada proyek-proyek pembangunan yang melanggar hak masyarakat dan merusak hutan. Hanya dengan mengakui, menjamin dan melindungi hak masyarakat tersebut, deforestasi benar-benar dapat dikendalikan sekaligus memberi kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan."

Pada penutupan acara, para peserta berjanji untuk saling bekerja sama dalam semangat solidaritas untuk membangun sebuah jaringan pertanggunggugatan global di tingkat akar rumput untuk melakukan pemantauan independen, mendokumentasikan, menentang dan menunjukkan wajah buruk perusakan hutan serta kekerasan dan pelanggaran hak masyarakat yang menyertainya.

Catatan untuk Editor

- Lihat <http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-roya-declaration-deforestation-and-rights-forest-people> untuk naskah lengkap Deklarasi *Palangkaraya* dalam Bahasa Indonesia, Inggris, Perancis dan Spanyol.
- Lokakarya internasional tentang [Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Hutan](#) pada 9-14 Maret 2014, diselenggarakan bersama oleh [Forest Peoples Programme \(FPP\)](#), [PUSAKA](#) dan POKKER SHK Kalteng di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Lokakarya ini mengikutsertakan masyarakat adat dan komunitas lokal dari Amerika Selatan (Peru, Colombia, Guyana, Paraguay), Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia) dan Afrika (Liberia, Cameroon, Democratic Republic of Congo), NGO pendukung, pemerintah, lembaga internasional dan para pakar kehutanan, untuk membahas berbagai studi kasus berbasis penelitian yang mendokumentasikan penyebab langsung maupun tak langsung perusakan hutan di beberapa negara tertentu, untuk berbagi pandangan terkini tentang penyebab dan akibat perusakan hutan, membahas langkah penanganan deforestasi, dan untuk mendorong hak-hak dan mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- Kontak:
 - Franky Samperante, PUSAKA: angkytm@gmail.com
 - Emil Ola Kleden, PUSAKA: kleden.emilola1@gmail.com
 - Joji Cariño, Forest Peoples Programme: joji@forestpeoples.org
 - Marcus Colchester, Forest Peoples Programme: marcus@forestpeoples.org
 - Tom Griffiths, Forest Peoples Programme: tom@forestpeoples.org
- PUSAKA, Kompleks Rawa Bambu I, Jl.B No. 6B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia; tel: +62 21789 2137; vav.pusaka@gmail.com; www.pusaka.or.id
- Forest Peoples Programme, 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, Gloucestershire GL56 9NQ, UK; tel. +44 (0)1608 652893; info@forestpeoples.org; www.forestpeoples.org